

PERAN KOMUNIKASI DAN KONTRIBUSI FILANTROPI DALAM PASCA DARURAT BENCANA

Monang Sitorus

Program Studi Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen,
Jalan Sutomo Nomor 4A, Medan, 20234, Indonesia

Email: monangporsea@yahoo.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah katulistiwa, diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, dan merupakan wilayah teritorial yang rawan dan tidak boleh menghindar dari bencana alam, melainkan harus dikelola secara profesional meskipun waktunya tidak dapat diprediksi secara handal. Serentetan fenomena alam seperti gempa dan tsunami telah terjadi di Indonesia, akibatnya menimbulkan tragedi kemanusiaan, hancurnya bangunan infrastruktur, dan pemukiman penduduk porak poranda, dimensi-dimensi kehidupan masyarakat yang dulunya tertata dengan baik menjadi tidak teratur, porakporanda dan sebagainya. Dari sederetan bencana yang menimpa tanah air dalam empat tahun terakhir ini tampaknya kita belum cerdas mengelola manajemen bencana. Kecemasan itu terbukti ketika bencana terjadi ketidakmampuan fundamental yang menyeruak adalah pengelolaan penanganan bencana mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca Bencana. Semuanya itu tidak terlepas dari peran media komunikasi yang sangat strategis. Sebab, setiap terjadi bencana faktor yang sangat strategis berperan adalah media komunikasi, masyarakat bisa panik jika tidak ada sumber informasi yang jelas, masyarakat bingung kemana mereka pergi untuk menyelamatkan diri. Masyarakat bisa panik bilamana keluarga tidak bisa dihubungi, demikian juga pemerintah maupun lembaga-lembaga lain yang ingin membantu korban bencana. Demikian juga peran filantropi sangat fundamental untuk memacu masyarakat yang ditimpah bencana, karena itu masyarakat sipil yang kuat hanya mungkin dibangun dengan dukungan keberadaan organisasi non pemerintah (NGO) yang berdaya dan filantropi (kedermawanan sosial) yang efektif semuanya tidak terlepas dari komunikasi yang muarahnya dapat membangun kehidupan yang lebih baik

Abstract

Indonesia as the archipelagic state that geographically was located in the area of the equator, around the Asian Continent and the Australian Continent, as well as around the Pacific Ocean and the Hindia Ocean, was in the meeting of three slabs of world tectonics, and was the serious territorial territory and might not avoid the natural disaster, but must professionally managed although the time could not be predicted in a competent manner. A series of the phenomenon of nature as the earthquake and the tsunami happened in Indonesia, as a result caused the human tragedy, destruction of the infrastructure building, and the settlement of the inhabitants was dissolved, the dimensions of the life of the community that previously was organised well to was not arranged. A row of the disaster that struck the homeland for the last four year apparently we not yet smart carried out the management of the disaster. The concern was proven when the disaster happened the

fundamental disability was the handling management of the disaster beginning with the prevention stage, preparedness, preceptive the emergency and post the Disaster. All those were not free from the role of the very strategic communication media. Because of every time the strategic factor disaster happened played a role in being the communication media, the community could panic if not having the source of clear information, the confused community where they went to escape. The community could panic when the family could not be contacted, likewise the government and other agencies that wanted to help disaster casualties. Likewise the role of philanthropy was very fundamental to encourage the community as the victims of disaster, because that the strong civil community was perhaps only built with the existence support of the the Non Governmental Organization (NGO) that was powerful and philanthropy (the social generosity) that was effective all of them were not free from communication that hopefully could develop the better life for at the future.

Keyword: Keywords: the role of communication, the philanthropy contribution

1. Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Serentetan fenomena alam seperti gempa dan tsunami telah terjadi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya tragedi kemanusiaan, hancurnya bangunan infrastruktur, dan pemukiman penduduk yang lululantak dan porak poranda. Dimensi-dimensi kehidupan masyarakat yang dulunya tertata dengan baik menjadi tidak teratur. Jika dirunut kebelakang bencana fenomena alam sejak mulai dari Aceh 26 Desember 2004, Nias Maret 2005, Padang Mei 2005, Yogyakarta Mei 2006, Pangandaran Juli 2006, Sumatera Barat Maret 2007, Indramayu 9 Agustus 2007. Menyusul di Bengkulu 12-13 September 2007, dan merupakan yang kedua setelah Juni 2000. Gempa dengan kekuatan 7,9 pada skala richter berpusat di laut dengan episentrum 4,67 LS dan 101,13 BT, 159 km barat daya Kota Bengkulu, yang dirasakan di Padang, Jambi dan Mentawai sampai ke Jakarta dan Singapura. Dari serentetan gempa dan tsunami yang paling banyak menelan korban, dan amat menyedihkan adalah bencana tsunami di Aceh dengan kekuatan 8,9 skala richter, pusat gempa berada pada 250 km dari kota Banda Aceh, dengan gelombang air setinggi 20 meter. Suatu bencana tsunami dikatakan berbahaya apabila telah memenuhi syarat minimal:

Tabel 1. Kategori Bahaya Bencana Tsunami

No	Keterangan	Gerakan
1	Kekuatan Gempa di atas	6,4 Skala Richter
2	Kedalaman Gempa di bawah	60-70 km
3	Lokasi Gempa	Di bawah laut
4	Gerakan Patahan Bumi	Vertikal

Sumber : *Media Indonesia 14 September 2007*

Gempa di Aceh merupakan yang terbesar di Kawasan Asia yang mencakup Indonesia, Sri Langkah, India, Thailand, Afrika Utara, Myammar, Maldives, dan Malasya, dengan jumlah korban sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Korban Bencana Tsunami
Tahun 2004**

No	Negara	Status		
		Meninggal	Hilang	Kehilangan tmt tinggal
1	Indonesia	126.326	93.816	419.682
2	Sri Langkah	31.187	4.280	545.714
3	India	16.389	Dta	647.599
4	Thailand	53.395	2.932	Dta
5	Afrika Utara	312	158	2.320
6	Myanmar	90	10	Dta
7	Maldives	82	26	21.663
8	Malaysia	68	12	Dta

Sumber : Badan Koordinasi PBB (dalam Sitorus, *Journal of Business Administration on line Vol. 5 No. 1. Spring 2006* <http://jbao.atu.edu> di akses 29 April 2008.

Dari sederetan bencana yang menimpa Tanah Air dalam tiga tahun terakhir ini tampaknya kita belum cerdas mengelola manajemen bencana. Kecemasan itu terbukti ketika bencana terjadi di Bengkulu ketidakmampuan fundamental yang menyeruak adalah pengelolaan penanganan bencana atau manajemen bencana (*Media Indonesia, 19 September 2007*). Ketika bencana datang, yang dipersiapkan adalah otoritas. Bupati merasa tidak berwenang, gubernur tidak berdaya, dan pemerintah pusat pusing. Biasanya yang melumpuhkan daerah kurang tanggap adalah faktor “pendanaan” sebagai motor penggerak. Walaupun dana tersedia harus menunggu semua otoritas bertemu dan bersepakat sementara masyarakat korban gempa sangat membutuhkan bantuan. Meskipun Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah disetujui sejak Maret 2007 DPR dan disahkan Presiden 26 April 2007, tampaknya belum optimal diimplementasikan, bahkan belum bisa melahirkan manajemen bencana yang profesional.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, dan merupakan wilayah teritorial yang rawan dan tidak boleh menghindar dari bencana alam, melainkan harus dikelola secara profesional meskipun waktunya tidak dapat diprediksi secara handal. Berdasarkan catatan sejarah daerah-daerah yang potensial rawan gempa adalah Halmahera, pantai utara Irian, lokasi ini sangat potensial dan aktif bisa berkekuatan di atas 8 skala richter (sr). Adapun kategori aktif berkekuatan gempa 7 hingga 8 sr terjadi di daerah barat Sumatera, pantai Selatan Jawa, Nusa Tenggara, dan Banda (*Media Indonesia 14 September 2007*).

Sesungguhnya kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah, dengan jumlah penduduk yang besar dengan penyebaran yang tidak merata, pengaturan tata ruang yang belum tertib, masalah penyimpangan pemanfaatan kekayaan alam, keanekaragaman suku, agama, adat budaya, golongan, pengaruh globalisasi serta permasalahan sosial lainnya yang sangat kompleks mengakibatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi wilayah yang rawan konflik atau rawan terhadap bencana akibat ulah manusia, maupun faktor alam. Karena itu, kita tidak boleh berhenti mensosialisasikan daerah rawan

gempa, melalui manajemen bencana. Sebab di dalam pulau-pulau NKRI kini bermukim saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Mereka adalah sumber daya paling penting dan berharga bagi setiap bangsa. Sebab, manakala terjadi gempa seperti bencana tsunami akan menimbulkan perubahan atmosfer pembangunan disegala bidang. Bintoro (1999:43) mengatakan pembangunan meliputi perubahan sosial yang besar, atau suatu keadaan dan kondisi masyarakat tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi masyarakat yang dianggap paling baik, atau lebih baik dari semula. Riggs (1996:XIII) juga menyampaikan pembangunan menyangkut hubungan antara masyarakat dengan lingkungan. Dari kedua pendapat ahli tersebut proses pembangunan yang berkelanjutan akibat bencana sangat strategik dipikirkan, mau tidak mau perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk optimalisasi pembangunan pemukiman yang baru (berkelanjutan). Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan wawasan pembangunan berkelanjutan dan sinergitas oleh semua unsur pemerintahan dan masyarakat dalam mencegah (peringatan dini), mengurangi, serta mengendalikan dan menanggulangi bencana dan dampaknya sehingga bentuk kerugian yang akan dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah dapat diprediksi sedini mungkin dan diminimalisir.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Setiap terjadi bencana faktor yang sangat strategis berperan adalah media komunikasi, masyarakat bisa panik jika tidak ada sumber informasi yang jelas. Masyarakat bingung kemana mereka pergi untuk menyelamatkan diri. Masyarakat panik dimana keluarga mereka berada, demikian juga pemerintah maupun lembaga-lembaga lain yang ingin membantu korban bencana. Untuk itu perlu suatu lembaga khusus yang menanganinya. Media komunikasi pada fase persiapan, kesiapan, tanggap darurat, dan pasca darurat sangat membutuhkan peran komunikasi. Untuk mengelolanya tentu saja dibutuhkan suatu lembaga yang akurat dan bertanggung jawab sebagai sumber informasi.

Di Indonesia, awalnya dikenal berbagai organisasi penanggulangan bencana yang didirikan oleh pemerintah dengan menggulirkan kebijakan melalui Keputusan Presiden No 3 Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk skala nasional, dikenal sebagai Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP), untuk skala provinsi dikenal sebagai Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satkorlak PBP), dan untuk skala kabupaten/kota dikenal sebagai Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP). Kemudian untuk pendirian Satkorlak dan Satlak di daerah didasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2003. Sifat kelembagaan tersebut masih bersifat *ad hoc* (temporer), sehingga belum optimal mengatasi bencana.

Pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana yang profesional adalah salah satu cara yang harus dilakukan untuk mengkoordinasikan aktifitas pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan dampak bencana. Kelembagaan harus memiliki otoritas yang jelas dan bukan temporer serta didukung finansial yang cukup memadai dari APBN. Karena itu, pemerintah menggulirkan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Intinya perlu dibentuk lembaga khusus yang menangani bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Pejabat ditingkat provinsi tingkat eselon 1B, untuk kabupaten eselon 2A. Dengan terbitnya kebijakan baru itu, dengan sendirinya Bakornas PBP, Satkorlak dan Satlak tidak berfungsi lagi. Sebagaimana, Riaydi (2003:109), lembaga yang permanen akan dapat membantu pelayanan pemerintah kepada

masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang dan sebagai salah satu wujud dari tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Untuk melihat penerapan manajemen bencana dapat ditelusuri dari siklus manajemen bencana yang terdiri dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana. Pencegahan dapat dilakukan melalui kegiatan pembuatan peta rawan bencana beserta potensi kerugian pada masing-masing daerah, penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan kepada aparat pemerintah maupun kepada masyarakat mengenai pencegahan dan kemungkinan terjadinya bencana/konflik serta tata cara penyelamatan diri bila terjadi bencana. Maupun kegiatan gladi lapangan (simulasi) yang ditujukan untuk memberikan kesiapan bagi aparat dan masyarakat untuk menangani atau menyelamatkan diri pada saat terjadi bencana. Kegiatan ini telah dilaksanakan tiap tahun oleh instansi terkait. Kesiapsiagaan, dilakukan melalui peningkatan peran BNPB agar mampu meredam dampak bencana yang akan terjadi di masa yang akan datang, maupun kesiapan pada saat terjadi bencana. Tanggap darurat, dengan agenda pembahasan tentang rencana jangka pendek BNPB dan secara otomatis masing-masing bidang akan menjalankan tugasnya sesuai fungsi yang diembannya. Pasca darurat, melakukan aktivitas atau penataan ulang daerah bencana yang lebih baik lagi.

Manajemen bencana yang dikembangkan pada saat ini tampaknya masih kurang melibatkan masyarakat di sekitar wilayah bencana, yang pada umumnya masih sebatas pada hal-hal yang bersifat pencegahan dan mitigasi. Pengalaman Indonesia yang telah mengalami bencana berkali-kali, ternyata belum juga melahirkan organisasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang handal. Hal ini terbukti dari berlarut-larutnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Profesionalisme aparat Bakornas PBP, Satkorlak PBP, Satlak PB belum optimal, karena penanganan bencana yang belum berjalan secara sistematis, atau belum memiliki *Standar Operating Prosedure* (SOP). Bahkan, prosedur penanganan bencana biasanya ditetapkan secara mendadak setelah bencana terjadi. Karena itu, dengan terbitnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diyakini pemerintah dapat melaksanakan manajemen bencana dalam pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas dapat disajikan model sistem penanganan manajemen bencana, yaitu: meskipun kajian tentang manajemen bencana belum populer atau menjadi disiplin ilmu tersendiri (mandiri), tentu saja kita tidak terlena untuk mengisi kekosongan disiplin ilmu, sebab manajemen bencana untuk wilayah yang rawan bencana seperti Indonesia diharuskan untuk memikirkan dan mengembangkannya menjadi disiplin ilmu tersendiri, bahkan akan lebih baik jika dimulai dari pendidikan dasar. Jika dikaji pentingnya komunikasi tentu saja untuk mempermudah pembuatan keputusan dan koordinasi dalam penanganan bencana. Komunikasi menurut Cook & Hunsaker (2001:272) bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial. Dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Komunikasi yang efektif dan efisien menurut Cook & Hunsaker adalah :

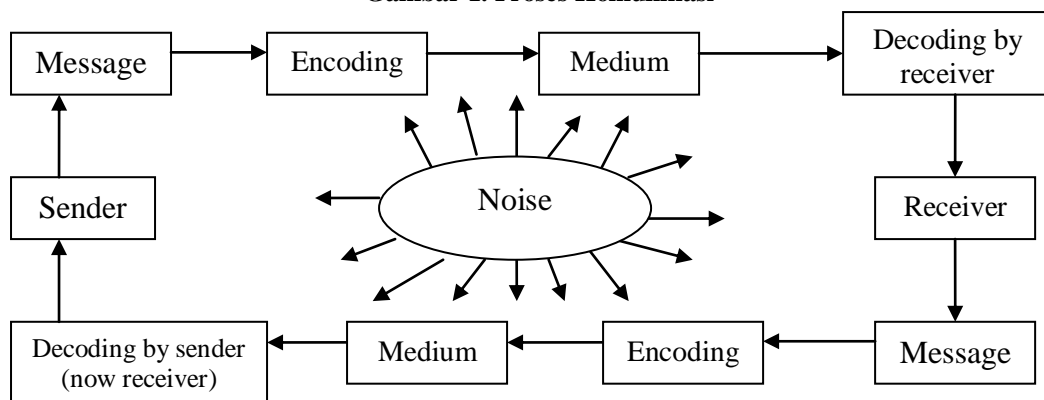
“effective communication occurs when the receiver interprets the message exactly as the sender intended. Efficient communication use less time and fewer resources”. (2001:272).

Selanjutnya, George and Jones (2002: 431) mengemukakan bahwa komunikasi *“is the sharing of information between two or more individuals or groups to reach common understanding”*. Sedangkan menurut Greenberg dan Baron komunikasi didefinisikan sebagai berikut:

“the process by which a person, group or organization (the sender) transmits some type of information (the message to another person, group, or organization (the receiver)”. (2003:318).

Adapun menurut Cook & Hunsaker (2001:272) bahwa komunikasi adalah “the process of one person sending a message to another with the intent of evoking a response”. Dari definisi-definisi tersebut tergambar bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi yang berupa pesan-pesan dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi yang baik dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan sebagaimana dikemukakan George & Jones (2002: 433 – 436) sebagai berikut: (1). Menghasilkan pengetahuan tentang tujuan organisasi, bagaimana kinerja pekerjaan, standar perilaku yang diterima dan keinginan untuk berubah. (2). Memotivasi anggota organisasi dengan meningkatkan pengharapan, menetapkan tujuan tertentu dengan tingkat kesulitan yang meningkat dan memberikan umpan balik. (3). Upaya pengawasan dan koordinasi individu dengan mengurangi kemalasan anggota organisasi, meningkatkan keberperanan, penegakan aturan dan norma dan mencegah tumpang tindih pekerjaan. (4). Dengan komunikasi anggota organisasi dapat mengutarakan perasaan dan emosinya. Sedangkan komunikasi yang efektif terdiri dari sejumlah tahapan-tahapan menurut George & Jones (2002:436-441) yaitu: (1). *Sender*: adalah orang atau kelompok atau organisasi yang membutuhkan untuk membagi informasi kepada seseorang, sekelompok orang, kelompok atau organisasi lain. (2). *Encoding*: menterjemahkan informasi ke dalam format tertentu yang dapat disampaikan. (3). *Pesan (Message)* adalah hasil dari proses encoding. (4). *Transmission* adalah proses penyampaian pesan (message) kepada penerima pesan. (5). *Media (channel)* adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi. (6). *Receiver*: penerima pesan dapat berupa individu, kelompok atau organisasi. Secara skematis proses komunikasi dapat digambarkan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Proses Komunikasi



Komunikasi dalam organisasi baik antar anggota organisasi, atau antar unit organisasi dapat bersifat vertikal atau lateral, formal atau informal (Cook & Husnaker, 2001:278), sedangkan menurut Greenberg & Baron (2003:321) bentuk komunikasi itu terdiri atas:

“Verbal Communication (involving the use of words) and Nonverbal Communication (the process of communicating without words)”. Komunikasi verbal dapat dilakukan dengan secara lisan (oral media) dan secara tulisan (written media). Komunikasi secara oral dapat dilakukan secara *face to face*, *discussions or communication*, dapat pula dilakukan dengan menggunakan saluran telepon atau alat komunikasi lain. Komunikasi ini dapat bersifat satu

arah seperti ceramah atau pengarahan tanpa ada kesempatan untuk merespon apa yang diceramahkan atau diarahkan atau yang bersifat interaktif dan komunikasi dua arah seperti diskusi, atau bercakap-cakap. Begitu halnya komunikasi secara tulisan dapat berupa surat, memo, *e-mail* yang bersifat satu arah atau yang bersifat dua arah *chatting*.

Jika dikaitkan komunikasi dan manajemen dengan meminjam istilah manajemen yang di rancang George R. Terry dalam bukunya "*Principles of Management*" (1977), yang telah lama digulirkan, namun kekinian terus dipakai di pemerintahan. Sebagaimana digoreskan dalam *Buku Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik* yang diterbitkan oleh Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik oleh BAPPENAS (2007:14) mengatakan "fungsi-fungsi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan), dan komunikasi dapat diterapkan sebagai penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintah".

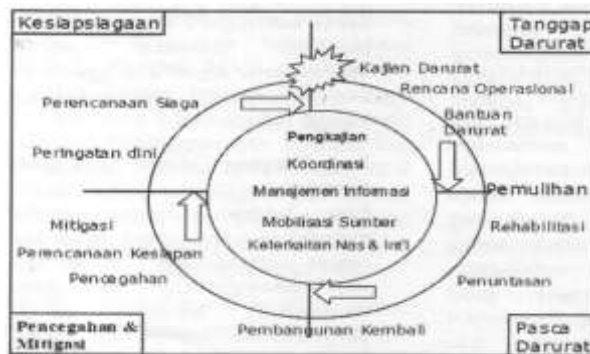
Manajemen umum hasil rancangan Terry tersebut dapat diadopsi dan dikembangkan menjadi manajemen hibrid dalam manajemen bencana. Bencana yang disebabkan oleh alam seringkali dianggap sebagai sesuatu yang harus terjadi, tetapi sulit diprediksi kapan terjadi. Ruang lingkup manajemen bencana setidaknya mencakup gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, gelombang pasang (tsunami), kekeringan, banjir dan lainnya, adalah kondisi alam yang melekat pada bumi kita.

Agar implementasi manajemen bencana dapat membumi terutama dalam penanganan bencana. Coburn, and Spence (1994) mengatakan ada beberapa fase yang harus dilakukan (1). Fase Pencegahan. Mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Upaya tersebut misalnya: (a) melarang pembakaran hutan dalam perladangan; (h) melarang penambangan batu di daerah curam, dan hal-hal lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna mencegah terjadinya bencana. (2). Fase Penjinakan. Meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Dalam hal ini bentuk mitigasi, yaitu (a). Membuat *Buoy DART (Deep Ocean Assessment and Reporting of tsunami)* yaitu membuat alat dan disebar ke laut dan berfungsi sebagai alat pengkaji dan pelapor sinyal ke satelit di angkasa tentang potensi tsunami yang dipicu akibat gempa; (b). mitigasi non struktural seperti peraturan perundang-undangan, tata ruang dan pelatihan. Menurut Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Indonesia membutuhkan sekitar 30 *buoy* yang ditempatkan di lautan Indonesia. (3). Fase Kesiapsiagaan. Mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat, efektif dan siap siaga, misalnya penyiapan sarana komunikasi, pos komando dan penyiapan lokasi evakuasi. (4). Fase Peringatan Dini. Memberikan tanda-tanda peringatan dini berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, gejala alam, maupun melalui penggunaan alat bantu deteksi dini, tentang kemungkinan akan segera terjadinya bencana. (5). Fase Tanggap Darurat. Menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian. (6). Fase Bantuan Darurat. Upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa, pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih. (7). Fase Pemulihan. Memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula termasuk didalamnya upaya yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar seperti jalan, listrik, air bersih, pasar dan puskesmas. (8). Fase Rehabilitasi. Membantu masyarakat dalam memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting lainnya serta yang lebih penting lagi adalah untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. (9). Fase Rekonstruksi. Perbaiki fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama dari sebelum terjadinya bencana, bahkan jika dimungkinkan akan lebih baik dari sebelumnya.

Kesembilan fase di atas, secara garis besar dapat dilihat pada empat sisi yaitu sisi kesiapsiagaan; sisi tanggap darurat; sisi pasca darurat; pencegahan dan mitigasi. Fase-fase tersebut bila digambarkan dalam satu siklus yang sempurna dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. Fase-Fase Bencana

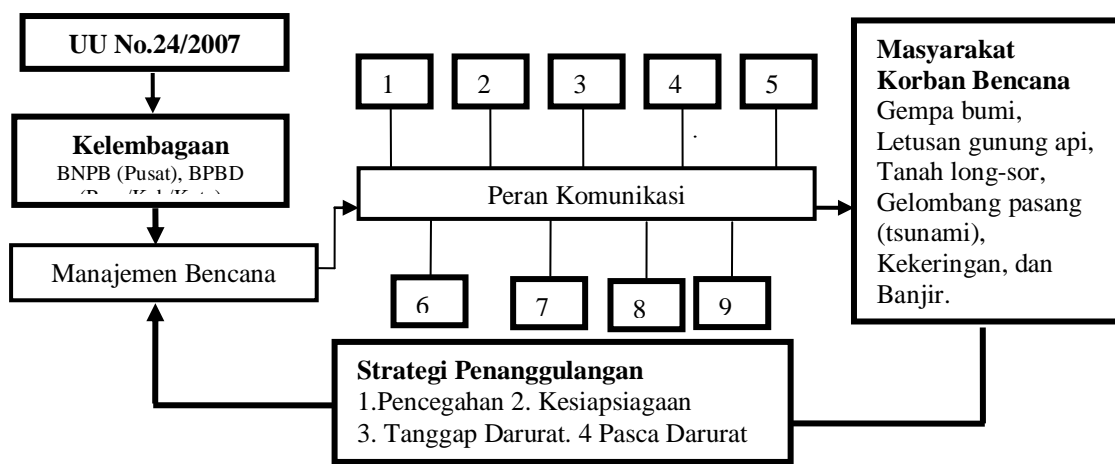


Sumber: Sekretariat Bakornas PBP. 2003.

Selain hal-hal tersebut beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan manajemen bencana, adalah: (1). Penanganan pengungsi. Penanganan pengungsi adalah pemberian pertolongan dan bantuan awal sebagai usaha penyelamatan. Setelah itu dilakukan pembinaan dan pemulihan fisik. Kemudian pembinaan kemasyarakatan serta terakhir pengembalian ke tempat asal atau relokasi yang baru. (2). Koordinasi. Kegiatan koordinasi dimulai dengan pembuatan kebijakan program sektoral pada tahap sebelum dan setelah terjadinya bencana dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sehingga terwujud *grand design* pembangunan berkelanjutan untuk membangun kembali kawasan bencana yang lebih baik

Agar setiap fase-fase tersebut dapat berjalan dengan baik, tentu saja membutuhkan media komunikasi sebagai sarana yang amat vital (strategis) agar setiap fase tersebut dapat berjalan dengan baik. Tanpa komunikasi yang jelas tidak akan mungkin fase-fase (tahapan) tersebut berjalan seirama. Karena media maupun berita yang disajikan sebagai input setiap fase tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Berdasarkan uraian di atas dapat disajikan peran komunikasi dalam penanganan manajemen bencana, yaitu:

Gambar 3. Model Sistem Penanganan Manajemen Bencana



3. Objek dan Metode Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, tulisan ini akan diurai dengan menggunakan metode deskriptif.

Sugiyono (2008:58) mengatakan metode deskriptif adalah “suatu metode penelitian dengan mengurai atau mendeskripsikan secara sistematis tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan teori-teori peranan komunikasi, melalui pendefinisian dan kemudian diurai sehingga dan peranan komunikasi untuk mengatasi bencana semakin menjadi lebih jelas dan terarah”.

Untuk memperkuat argumentasi hasil deskripsi kajian teoritis ini, juga didukung dengan data-data akurat yang diperoleh dari media cetak dan elektronik, khususnya data-data yang berkaitan dengan bencana. Lebih jelasnya kajian teori-teori tentang komunikasi, peran kelembagaan, manajemen bencana, dan filantropi (kedermawanan sosial), akan dideskripsikan lebih lanjut.

4. Pembahasan

Jika ditelusuri asal kata filantropi berasal dari kata Yunani yaitu *philein*, "cinta" dan *anthropos*, "manusia", atau seorang yang mencintai sesama (manusia). Seorang ini biasanya seorang kaya raya yang sering menyumbang kaum miskin. Karena itu, masyarakat sipil yang kuat hanya mungkin dibangun dengan dukungan keberadaan organisasi non pemerintah (NGO) yang berdaya dan filantropi (kedermawanan sosial) yang efektif. Karena itu, agar penataan kelembagaan bencana dapat optimal satu hal yang sangat vital dan tidak bisa dilupakan harus disokong uluran tangan para filantropi (kedermawanan sosial) di daerah bencana. Sebab, organisasi kelembagaan bencana membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengatasi tragedi kemanusiaan.

Disamping itu, juga dibutuhkan tenaga-tenaga profesional yang mampu mengatasi masalah-masalah sosial di daerah bencana. Karena sifatnya mengarah pada investasi sosial, filantropi diharapkan mampu menghasilkan penguatan masyarakat dan sekaligus modal sosial (*social capital*), untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan dan kelestarian lingkungan di daerah bencana. Untuk itu, organisasi nirlaba (NGO) perlu menjalin kerjasama (jejaring) untuk memajukan filantropi sebagai mekanisme utama dalam penguatan masyarakat sipil di wilayah bencana. Kolaborasi yang produktif sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan yang muncul karena kurangnya sumber daya manusia dan referensi yang dapat diandalkan.

Sejatinya, peran filantropi sangat vital untuk membantu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen bencana. Tanpa dana yang cukup serta sumberdaya manusia yang profesional implemementasi manajemen bencana tidak akan bermakna (nilai). Sebab dengan dana yang tersedia dari para filantrop serta diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat mempercepat penanganan para pengungsi. Tegasnya, apa yang diungkapkan

Angela dan Nickel (2007) mengatakan bahwa filantropi sebagai tindakan memberikan uang dan sumber daya lain, untuk membantu individu, bidang sasaran tertentu (*causes*) dan organisasi-organisasi koritas sangat vital mengatasi tragedi kemanusiaan seperti yang kondisi traumatik, biaya makanan dan minuman, pakaian, tempat berlindung, obat-obatan, anak-anak terlantar, mereka semuanya itu membutuhkan biaya yang cukup besar.

Filantropi merupakan motor gerak cepat di daerah bencana sekaligus untuk membantu pemerintah mengurangi beban anggarannya yang semakin terbatas. Bahkan menurut konsep UNDP 2005, peran filantropi di seluruh dunia terutama menghadapi bencana tragedi kemanusiaan menjadi bahan pemicu peningkatan kesadaran dan ketergantungan kepada filantropi, sekaligus menghindari jurang antara kaum kaya dan miskin, bahkan merupakan gerakan global untuk menghilangkan penyebab-penyebab tragedi kemanusiaan (bencana).

Ada bukti tersendiri yang tidak bisa dilupakan, peran filantropi yang diorganisir melalui wadah NGO lokal dan internasional dan lembaga donor internasional setelah satu tahun bencana tsunami di Nangroe Aceh Darusalam. Dengan kehadiran NGO lokal dan global di Aceh dapat mempercepat pembangunan masyarakat sipil yang lebih baik. Lebih jelasnya, kinerja NGO lokal dan internasional, dan Lembaga Donor Internasional dapat yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Kinerja NGO Lokal, Internasional, dan Lembaga Donor Internasional

No	Jenis Pekerjaan	Target	Realisasi
1	2	3	4
1	Perikanan	20.000 Ha	5.000 Ha
2	Pengadaan Perahu (Boat)	4.717	3.122
3	Menyediakan Transportasi Becak Bermotor	300	57
4	Memperbaiki daerah pertanian/ perkebunan	60.000 Ha	13.000 Ha
5	Memindahkan Petani yang Mengungsi	80.000 jiwa	40.000 jiwa
6	Memperbaiki rumah yang rusak	120.000 unit	30.000 unit
7	Memperbaiki Jalan	3.000 km	236 km
8	Membangun Jembatan	150 nit	120 unit
9	Memperbaiki Sekolah yang Rusak	20.000 gedung	335 gedung
10	Memperbaiki Puskesmas yang rusak	114	51
11	Rumah sakit dan Klinik	60	38
12	Membangun Pelabuhan yang rusak	-	5
13	Membangun Asrama Penampungan Anak yang hilang Orangnya (Ayah dan Ibu)	-	1 unit

	hilang		
--	--------	--	--

Sumber: Badan Rehabilitasi Rekonstruksi (BRR) 2005.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, semua kegiatan pasca tsunami tentu saja membutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun Aceh yang lebih baik, baik tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, peran flantropi dan NGO (*Non-Governmental Organization*) kini terus melakukan *capacity building* yang berorientasi kepada *relief and welfare* (Korten, 1987). Selama pasca tsunami para NGO tersebar di wilayah pengungsian dengan jumlah 120 NGO luar negeri dan 430 NGO Lokal, 16 lembaga donor resmi internasional baik dari NGO, seperti Bank Dunia, USAID, BODA dan seluruh organ yang berada dibawah naungan PBB, dengan lebih dari 5.000 konsultan staf asing untuk membangun Aceh yang lebih baik. Wolfgang Fengler selaku ketua penulis laporan Bank Dunia tentang Rekonstruksi Aceh yang bertajuk "Membangun Aceh dan Nias yang lebih baik" mengatakan telah dialokasikan dana untuk memperbaiki infrastruktur dan perumahan sebesar US \$ 1,4 miliar, sektor sosial US\$ 900 juta semuanya dana tersebut berasal dari Bank Dunia maupun flantropi. Laporan Bank Dunia setelah setahun tsunami 4,4, miliar dollar AS telah dialokasikan oleh berbagai pihak donasi, dari total bantuan yang dijanjikan sebesar 7,5 miliar dollar AS Tegasnya, peran filantropi di daerah bencana tsunami Aceh merupakan penggerak denyut jantung kehidupan umat manusia dan tak diragukan lagi di daerah bencana, sebab dengan bantuan dari pihak donasi para NGO dapat membangun perumahan tipe 36 untuk para pengungsi di desa Cot Paya Aceh. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. Para NGO sedang membangun rumah tipe 36 di desa Cot Paya Aceh



Meskipun mereka telah memberikan bantuan dana kemanusiaan, bukan berarti mereka lepas tanggungjawab, melainkan tetap melakukan monitoring seperti yang dilakukan mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain di Aceh. Bill Clinton bersama ketua BRR Kuntoro Mangkubroto sedang memonitoring implementasi *capacity building* di desa Kajhu Aceh Besar seperti yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 5. Mantan Presiden AS Bill Clinton bersama ketua BRR Kuntoro Mangkubroto sedang meninjau lokasi bencana di desa Kajhu Aceh Besar



Hasil penelitian yang dilakukan Sitorus yang berjudul ”*Non-Government Organization (NGO) Leadership Effect Over Small Business Development By Tsunami Victims In Nangroe Aceh Darusalam, Indonesia*” (2006) khususnya dikawasan pengungsian akibat bencana tsunami di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terhadap 459 kepala keluarga pengungsi dengan sampel 210 orang disimpulkan betapa besar kepemimpinan NGO di Aceh untuk membantu para pengungsi terutama yang tinggal dibarak pengungsi, mereka yang masih traumatic tetapi dengan peran kedermawanan para NGO membuat mereka secara perlahan-lahan lebih semangat untuk menatap hidup masa depan yang lebih baik. Tegasnya, para NGO di Aceh umumnya tidak dibungkus dengan label ”amal bakti”, tidak membedakan agama, pendidikan, warga negara, sosial budaya, maupun lokasi. Bahkan mereka membangun kapasitas (*capacity building*) sesuai dengan kondisi (kontekstual) daerah masing-masing.

Karena itu, peran filantropi maupun NGO di daerah bencana seperti Aceh bukan merupakan wacana terselubung atau amal bakti yang berkaitan dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti penghindaran [pajak](#) dengan efek samping popularitas personal, melainkan benar-benar dilakukan dari hati lubuk yang paling dalam. Meskipun ada perbedaan nilai yang dilakukan para filantrop seperti yang dilakukan Warren Buffett, George Soros yang berbentur dampak spekulasi sendiri, demikian juga Bill dan Melinda Gates yang bertujuan untuk memonopoli virtual dengan menggerakkan semua trik-trik guna meraih tujuan-tujuan tertentu, sehingga kedua filantrop tersebut merupakan broker filantrop terbesar atau kapitalisme gerak cepat sepanjang sejarah kemanusiaan (Slavoj Zizek, 2006: 42-43). Namun harus diakui kapitalisme gerak cepat yang dilakukan para filantrop kelas dunia tentu saja memberikan andil yang cukup besar dalam proses modernisasi dan globalisasi.

2. Kesimpulan dan Rekomendasi

Indonesia dikelilingi 3 (tiga) lempeng tektonik dunia, dan merupakan wilayah teritorial yang potensial rawan. Adapun kategori aktif berkekuatan gempa 7 hingga 8 sr berpeluang terjadi di daerah barat Sumatera, pantai Selatan Jawa, Nusa Tenggara, dan Banda. Karena itu, kita tidak boleh menghindar dari bencana alam, melainkan kita harus mengelolah dengan baik. Salah satu upaya mememanajemeni bencana dan mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan, tentu saja membutuhkan media komunikasi agar kinerja kelembagaan BNPB (Pusat), BPBD (Prop/Kab/Kota) sangat strategik. Sifat kelembagaan yang selama ini masih bersifat *ad hoc* disinyalir sebagai salah satu kelemahan dari komunikasi dalam manajemen bencana di tanah air, atau hanya fokus pada tahapan kedaruratan semata. Sedangkan tahapan penanggulangan bencana lainnya seperti pencegahan, kesiap-siagaan, dan mitigasi terhadap terjadinya bencana kurang mendapatkan perhatian yang cukup serius. Penyebab ini diakibatkan lemahnya komunikasi. Agar kelembagaan bencana dapat berjalan dengan cepat dibutuhkan media komunikasi berbasis global. Dalam konteks Indonesia yang rawan bencana alam sangat dibutuhkan filantropi yang erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya, tradisi keagamaan yang membutuhkan uluran pertolongan seketika.

Daftar Pustaka

Buku:

- Cook Curtins W & Hunsaker Philip. 2001. *Management and Organizational Behaviour*. New York : McGraw-Hill Education
- Coburn, A.W., Spence, R.J.S., Pomonis, A. 1994. *Mitigasi Bencana*. Edisi ke 2. Cambridge Architectural Research
- Greenberg Jerald & Robert A. Baron. 2003. *Behavior in Organization*. New Jersey : Prentice Hall International, Inc
- George Jennifer M & Jones Garenth R. 2002. *Organizational Behavior*. New Jersey : Prentice Hall International, Inc
- Korten. 1987. "Third Generation NGO Strategies A Key to People-centered Development" World Development 15, Supplement
- Kirmanto, Djoko. 2002. *Kebijakan Penanggulangan Bencana*. Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman.
- Kolokium Hasil Litbang Pemukiman 2002 - Pustekim, Bandung. *Mitigation Project: A Project Completion Report Implemented by Institute of Technology Bandung*. As seen on www.adpc.ait.ac.th. on June 25, 2005 Reed, Sheila B., Interworks. 1995. Pengantar Tentang Bahaya. Edisi ke 3. Program Pelatihan Manajemen Bencana. UNDP - DHA.
- Riadi, Bratamakusumah. Supriady Deddy. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Gramedia.
- Riggs, Fred, W. 1996. *Administrasi Pembangunan Sistem Administrasi dan Birokrasi*. Diterjemahkan oleh Hakim. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Royat, Sudjana. 2005. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Disampaikan pada acara Diskusi Terbatas di LAN RI, Jakarta, 29 Juni 2005.

Sekretariat Bakornas PBP. 2002. *Perkembangan Regulasi Kebencanaan di Indonesia*. Jakarta.

Sekretariat Bakornas PBP. 2003. *Pedoman Praktis Penanganan Bencana dan Kedaruratan*. Jakarta.

Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik 2007. *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta : BAPPENAS.

------. *Manajemen Bencana (opini)*. Dimuat di harian “Sinar Indonesia Baru (SIB)” harian lokal di Medan, 5 Januari 2007.

UNDRO. 1992. *Tinjauan Umum Manajemen Bencana*. Edisi ke 2. Program Pelatihan Manajemen Bencana. UNDP.

Wilches, Gustavo., Interworks. 1995. *Bencana dan Lingkungan*. Edisi ke 2. Program Pelatihan Manajemen Bencana. UNDP - DHA.

Artikel dalam jurnal:

Nickel Money Patricia dan Angela M. Eikenberry. “*Wacana Filantropi dalam Kapitalisme Gerak Cepat*”. GALANG Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani.Vol. 2 No.3 Agustus 2007.

Sitorus, Monang. 2006. *Non- Government Organization (NGO) Leadership Effect Over Small Business Development By Tsunami Victim in Nangroe Aceh Darusalam Indonesia* The Journal of Business Administration Online. Spring 2006. Vol.5 No.1. Accredited AACSB International, Arkansas Tech University.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung

Artikel dalam website:

Zizek Slavoj .2006 April 11. The Liberal Communists of Porto Davos. *In These Times*, Retrieval May 4 2006. from <http://www.inthesetimes.com/site.main/article.12574>.di akses 26/2/2009.

Bakornas PBP. 2005. *Disaster Management in Indonesia*. As seen on www.bakornaspbp.go.id. on 6 September 2007. Diakses 26/2/2009

Artikel dalam koran:

Sengara, Wayan.I. *Membangun Komunitas Tahan Gempa dan Tsunami*. Media Indonesia, 17 September 2007.

Dokumen:

Limited. Program Pelatihan Manajemen Bencana. UNDP - DHA. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2003 Tentang Struktur Organisasi Satuan Koordinasi Penanggulangan Bencana.

Penanganan Pengungsi Tingkat Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.